

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Adib Bisri dan Munawwir AF, 1999, *Kamus Indonesia Arab; Pustaka Progressif*; Surabaya.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- A. Hanafi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h.10, lihat pula H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ade Ari Syam Indradi, 2006, *Carding (modus operandi, penyidikan dan penindakan)*, Pensil 234, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek hukum dalam ekonomi global, Ghalia Indonesia* Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat* ,PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta.
- B.Simanjuntak, 1982, *Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dellyana,Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, cet. 1, Bina Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.

- Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan.
- Hadari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.8, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kartini Kartono. 2005, *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ledeng Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman; 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Moeljatno, 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Sri Redjeki Hartanto, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugatan Produsen dalam Perwujudan Perlindungan konsumen*, Genta press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, UI-Press Cetakan keempat, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Satria Effendi M. Zein, 2001, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, ed. Jaenal Arifin, M. Arskal Salim GP, Pustaka Firdaus. Jakarta.

Palan, 2007, *Competency Management. Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*. Penerjemah: Octa Melia Jalal. Penerbit PPM, Jakarta.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana, Setara Press, Malang.

Wisnu Cahyadi, 2008, *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambah Pangan*. Bumi Aksara. Jakarta

#### **B. Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

#### **C. Jurnal/Artikel Ilmiah**

Rina Oktaviani, *Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan*, Pusat Penelitian Dan

Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2015.

Syekh Mamdūh Farḥān al-Buḥairiy, Dalam Seminar “*Ḥalālan Ṭayyiba*” (Komisaris Umum Majalah Islam Qiblati –Indonesia) Di Universitas Brawijaya Malang, 18 –21 Februari 2014

**D. Internet :**

Badan POM,  
<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/88/FORMALIN.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, Jam 17.30 Wib

<http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2017, pada jam 11.00 wib.

<http://id.scribd.com/doc/59981007/an-Tugas-Fungsi-Dan-Peranan-Polri>, diakses pada hari senin 14 januari 2017 pukul 15.30

<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2017.

<https://id.scribd.com/document/324528095/PENGERTIAN-PANGAN>, 5 Agustus 2017, jam 10.25 Wib

<http://www.indonesiastudent.com/pengertian-pangan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017, jam 10.25 Wib